



AKSI TANAM MANGROVE

Dirut PT Pelindo Multi Terminal (SPMT) Drajat Sulistyono (kedua kiri) bersama Ketua Khadijah Saraswati Indonesia Sri Dewi (kiri), Penerima Kalpataru tahun 2013 Sahdan (kedua kanan), dan Penerima Kalpataru tahun 2003 Paris Sembiring (kanan) berfoto bersama saat aksi menanam bibit mangrove di Belawan, Medan, Sumatera Utara, Jumat (9/12). PT Pelindo Multi Terminal menanam 1.000 bibit pohon bakau di sepanjang kawasan pantai demi mengurangi dampak abrasi laut dan banjir rob di kawasan tersebut.

Mantan Kades Cikupa Tangerang Ditangkap atas Dugaan Pungli

Tersangka AM ditangkap untuk kasus dugaan pungli PTSL dengan kerugian mencapai kurang lebih Rp2 miliar. Selain AM, juga ditangkap tiga orang lainnya yang sebelumnya menjabat saat tersangka AM sebagai Kepala Desa Cikupa.

TANGERANG (IM)

- Polresta Tangerang menangkap AM yang merupakan mantan kepala desa Cikupa, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang berinisial AM. Penangkapan dilakukan karena AM diduga melakukan aksi pungutan liar (pungli) program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL).

"Tersangka AM ditangkap untuk kasus dugaan pungli PTSL dengan kerugian mencapai kurang lebih Rp2 miliar,"

kata Kapolresta Tangerang, Kombes Pol Raden Romdhon Natakusuma dalam siaran pers, Jumat (9/12).

Raden menjelaskan, selain AM, pihak kepolisian juga menangkap tiga orang lainnya yang sebelumnya menjabat saat tersangka AM sebagai Kepala Desa Cikupa. Ketiganya yakni SH, mantan Sekretaris Desa Cikupa, MI, mantan Kepala Urusan (Kaur) Perencanaan Desa Cikupa, dan MSE, mantan Kaur Keuangan

Desa Cikupa. "Tahun 2020 dan 2021, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Tangerang mengalokasikan 1.319 bidang untuk PTSL di Desa Cikupa," ujar Romdhon menerangkan awal kronologis kejadian.

Alokasi PTSL itu ditindaklanjuti pihak desa dengan mengadakan rapat pada Maret 2021. Pada rapat itu ditentukan tarif PTSL yakni untuk luas 50 meter dengan surat-surat lengkap dikenakan biaya Rp500 ribu. Untuk luas tanah lebih dari 50 meter dengan surat tidak lengkap dikenakan biaya Rp1 juta, sedangkan untuk luas tanah di atas 100 meter dengan surat tidak lengkap dikenakan biaya Rp1,5 juta.

"Selanjutnya tersangka AM memerintahkan para Ketua RT dan Ketua RW serta jaro untuk mengumpulkan berkas dan biaya kepada masyarakat," ujarnya. Lantas, uang hasil pungenan PTSL kemudian dikumpulkan ke Kaur Keuangan Desa Cikupa saat itu yakni tersangka MSE pada awal Maret 2021. Saat itu, uang yang terkumpul mencapai hingga Rp 619,1 juta. "Uang itu lalu dibagi bagi kepada Kepala Desa AM, Sekretaris Desa SH, Kaur Perencanaan MI, dan Kaur Keuangan MSE," ungkap Raden.

Raden melanjutkan, berdasarkan keterangan saksi, pada 2021 di Desa Cikupa dilakukan kegiatan pemilihan kepala desa (Pilkades). Tersangka AM kembali mencalonkan diri sebagai kepala desa, dan diduga uang hasil pungutan PTSL itu digunakan untuk keperluan Pilkades.

"Berdasarkan hasil penyelidikan, Desa Cikupa telah melaksanakan program PTSL tidak sesuai dengan aturan SKB 3 Menteri Nomor 25/SKB/V/2017, Nomor : 590-316A Tahun 2017, Nomor 34

Tahun 2017 tentang Pembiayaan persiapan pendaftaran Tanah Sistematis, untuk wilayah Jawa Bali sesuai dengan aturan dikenakan biaya Rp 150 ribu," jelasnya.

Atas dugaan penyelewengan tersebut, Polresta Tangerang langsung melakukan penangkapan terhadap keempatnya. Saat ini mereka diamankan di Mapolresta Tangerang untuk mempertanggungjawabkan perbuatan rasuahnya. Para tersangka dijerat Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) KUHP. Ancaman hukumannya yakni penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun. ● pp

DIDUGA TILIP UANG BANTUAN BENCANA RP308 JUTA

Eks Pejabat Dinsos Lebak Ditangkap

LEBAK (IM) - Polres Lebak menangkap mantan pejabat di Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Lebak berinisial ET (48), karena diduga menggelapkan uang bantuan sosial bencana kebakaran. ET diduga menggelapkan uang bantuan Rp 308 juta pada tahun 2021 untuk kepentingan pribadi.

Kapolres Lebak, AKBP Wiwin Setiawan mengatakan, ET diduga menggelapkan uang bantuan sosial saat dirinya menjabat sebagai Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial di Dinsos Lebak, Banten.

Uang bantuan untuk korban dibagikan dalam dua tahap. Namun, dananya ditilip oleh ET. "Tahap pertama yang terverifikasi sebanyak

52 penerima, tapi hanya enam saja yang dibagikan," kata Wiwin saat konferensi pers di Mapolres Lebak, Jumat (9/11).

Sementara pada tahap dua, seharusnya ada 75 keluarga yang menerima. Namun, hanya delapan saja yang disalurkan. Total uang yang digelapkan oleh ET dari dua tahap tersebut senilai Rp 308 juta.

Kepada penyidik, ET mengaku bahwa uang tersebut digunakan untuk membayar utang hingga foya-foya. Untuk menetapkan ET sebagai tersangka, penyidik masih memeriksa 150 saksi termasuk Kepala Dinas Sosial Lebak. ET ditangkap dalam pelariannya di Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang, Kamis (8/11-2022). ● pra

Komnas Anak Banten: 20 Bayi Dibuang Sepanjang 2022, 11 Tewas

SERANG (IM) - Komisi nasional (Komnas) Banten mencatat sebanyak 20 bayi dibuang sepanjang 2022 di Banten. 11 Di antaranya ditemukan dalam kondisi tewas.

"Sepanjang tahun 2022 ada 20 kasus ditemukannya bayi terlantar yang terjadi di sejumlah wilayah di Provinsi Banten," kata Ketua Komnas Anak Banten, Hendri Gunawan, Jum'at (9/12).

"Dari jumlah itu, ada 11 bayi meninggal, dan 9 di antaranya masih hidup," imbuh Hendri. Gunawan menjelaskan 20 bayi ini ditemukan di beberapa wilayah. Dia lalu menyortir kasus pembuangan bayi di Kabupaten Serang.

"Dari 20 kasus tersebut, 1 bayi ditemukan di Kota Serang, 7 bayi di kabupaten Serang, 6 bayi di kota Tangerang, 3 bayi di kota Tangsel, 1 bayi di Pandeglang, dan 2 di Lebak. Untuk kasus meninggal terjadi di Kota Serang, Kota Tangerang, dan Kabupaten Tangerang," ungkapnya.

Gunawan mengatakan pelaku atau orang tua yang membuang bayi kebanyakan masih berusia remaja. Menurutnya, bayi yang dibuang hasil dari hubungan di luar

pernikahan.

"Dari beberapa kasus yang didampingi langsung oleh Komnas Anak, ini terjadi lantaran ibu si bayi yang masih berusia anak-anak dan remaja. Malu atas kelahiran bayi tersebut," terangnya.

"Kelahiran yang tidak direncanakan disebabkan oleh hubungan di luar nikah, akibat pergaulan bebas dan luput dari pengawasan orang tua," sambung Hendri.

Ia mengatakan peristiwa ini harus menjadi perhatian semua kalangan baik dari pemerintah, masyarakat dan orang tua. Menurutnya, dalam undang-undang masyarakat punya peran dalam memberikan perlindungan kepada anak.

"Ini tentu perlu menjadi perhatian kita semua, dalam pasal 72 Undang-undang Perlindungan Anak dalam ayat 1 disebutkan bahwa masyarakat berperan serta dalam Perlindungan Anak, baik secara perseorangan maupun kelompok," ujar Hendri.

"Jadi sudah saatnya masyarakat saling bahu membahu, bekerja sama untuk bisa bergerak menyuarakan perlindungan anak," pungkask dia. ● pra

Sanksi KLHK Belum Dijalani, DLH Kota Tangerang Terkendala Anggaran

TANGERANG (IM) - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) memberikan sanksi terkait pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Rawa Kucing, Kota Tangerang.

Sejak dilayangkan sanksi tersebut pada Maret 2022, hingga saat ini baru sejumlah permasalahan yang bisa ditangani.

Kepala Bidang Penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan (PPKLH) Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Tangerang, Riswan Setio Kardinto mengungkapkan, sanksi itu merupakan bagian dari pembinaan dari KLHK.

"Menyikapi sanksi administrasi kita sudah terima, dan itu adalah bagian dari pembinaan dari KLHK selaku regulator tingkat pusat," ujarnya saat ditemui, Jumat (9/12).

"Dan yang sudah di-

sampaikan kepada kita, karena sifatnya perbaikan ya pasti kita akan perbaiki. Itu kan sanksi itu adalah bagian dari pembinaan, jadi kita akan sudah dan sedang berproses untuk memperbaiki," sambungnya.

Riswan memaparkan, untuk saat ini pihaknya masih terkendala di anggaran. Pasalnya, sanksi bersifat membangun harus dianggarkan terlebih dahulu.

"Sedangkan tahun anggaran sudah dijalankan tahun 2021 nah ada yang bisa dilaksanakan sebagian. Mekanisme penganggarannya sebagian di tahun depan sebagian lagi tahun depan," katanya.

Ia memaparkan, apabila sanksi melewati waktu yang ditentukan, terdapat kelengkapan atau perpanjangan waktu yang telah disepakati.

Sementara ini yang sudah diproses yakni Ruang

Terbuka Hijau (RTH) yang juga merupakan bagian dari pencemaran udara. Lalu, untuk pemenuhan air limbah sedang berproses.

"Misalkan dikasih batasan sanksi 140 hari, sedangkan kita sudah tidak bisa kunci tahun ini nih, gabisa kan kita langsung ngajutin penganggaran. Nah itu sudah kita sampaikan ke KLHK, dan ada namanya perpanjangan sanksi mekanisme. Kita meminta waktu mengajukan perpanjangan waktu untuk memperbaiki sanksi," jelasnya.

"Makanya kalo dibilang tidak bisa dieksekusi, ya betul tidak bisa langsung dieksekusi karena memang kita mengajukan penganggaran dulu untuk eksekusinya sebagian. Jadi, kita tidak bisa, misalkan mengeluarkan dana besar membangun sistem penangkapan gas metan, padahal tahun depan," imbuhnya. ● pp

400 Kendaraan Dinas Desa di Kecamatan Balaraja Tunggak Pajak hingga 2 Tahun

TANGERANG (IM) - Sebanyak 400 kendaraan dinas milik pemerintahan desa di Kabupaten Tangerang tunggak pajak selama 1 hingga 2 tahun. Hal tersebut tercatat dalam sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Balaraja.

Kepala Samsat Balaraja, Ali Hanafiah mengatakan, total ada 1.600 kendaraan bermotor milik pemerintahan di Kabupaten Tangerang, baik OPD, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan.

"Total sekitar 1.600 kendaraan. Namun yang belum membayar pajak sekitar 400 unit, kebanyakan kendaraan milik desa. Mungkin karena kendaranya sudah tua atau tidak terpakai lagi," katanya, Jumat (9/12).

Menurut Ali, apabila diuangkan dari 400 kendaraan total pajak kendaranya sebesar Rp500 juta. Dia juga mengatakan, seharusnya apabila ada kendaraan milik pemerintah yang sudah layak pakai atau telah dilelang, pihaknya diberi informasi. Sehingga pihaknya akan

menghapus catatan potensi pendapatan dari kendaraan.

"Baiknya memang disinformasi kepada kami. Jadi kamu juga tidak memasukan semua kendaraan sebagai potensi pendapatan. Ketika diinformasikan, nanti akan kita hapus data kendaraan tersebut dari sumber potensi pendapatan," ungkapnya.

Namun, lanjutnya, untuk total keseluruhan pendapatan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Tangerang ini telah mencapai 98,93 persen dari target Rp 354 miliar dan pertanggal 6 sudah mencapai Rp350 miliar.

"Kalau melihat tren hari ini, insyaAllah sampai akhir tahun target 110 persen itu tercapai," ucapnya.

Dikatakannya, untuk memenuhi target Samsat Balaraja, pihaknya melakukan anjuran secara door to door. Dalam artian melakukan razia di jalan.

"Untuk memenuhi target, kita lakukan door to door dengan melakukan razia," pungkasnya. ● pp



PERKEMBANGAN JARINGAN 5G

Foto udara teknis melakukan perawatan Base Transceiver Station (BTS) XL Axiata di Pantai Barat, Desa Pananjat, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, Jumat (9/12). Perkembangan jaringan 5G di Indonesia berpotensi memberikan kontribusi lebih dari Rp2.800 triliun atau setara 9,5 persen dari total Produk domestik bruto (PDB) pada 2030, bahkan berpotensi bisa melonjak menjadi Rp3,500 triliun pada 2035.

DLH Kabupaten Serang Terapkan Pengelolaan Sampah dengan Metode 3R

SERANG (IM) - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Serang menerapkan pelayanan pengelolaan sampah menggunakan metode 3R yakni reduce (mengurangi), reuse (penggunaan kembali), recycle (daur ulang).

"Kalau berbicara pengelolaan sampah ada dua, yaitu ada penanganan dan pengurangan sampah," kata Kepala seksi (Kasi) pengelolaan sampah, Cahyo Harsanto saat ditemui di ruangannya, Jumat (9/12).

Ia juga menjelaskan, untuk penanganan sendiri merupakan sebuah armada kendaraan operasional pengangkut, sedangkan pengurangannya itu akan dilakukan dengan pembentukan bank sampah di setiap desa.

Kata dia, pemerintah kabupaten (Pemkab) melalui DLH membentuk "bank sampah" agar masyarakat tidak membuang sampah ke Tempat Pembuangan Sampah (TPA) sehingga bisa mengurangi pencemaran lingkungan.

"Dampak dari bank sampah itu dapat sisi edukasinya, sampah yang dibuat ke TPA semakin kecil, dan masyarakat akan mendapatkan manfaat secara ekonomi. Dan hasilnya bisa didaur ulang serta dijual," tambah Cahyo.

Langkah DLH sendiri agar bank sampah binaan bisa berjalan dengan baik terus melakukan sosialisasi di mana-mana serta bekerja sama dengan Kuliah Kerja Nyata (KKN) dengan mengarahkan pengelolaan sampah.

"Di Kabupaten Serang sendiri sudah 30 unit bank sampah yang sudah terdaftar, dan di luar itu masih ada lagi," katanya.

"Jadi kalau sampah kita kurangi melalui bank sampah otomatis biaya retribusi ke TPA juga berkurang, serta masyarakat juga mendapatkan manfaat secara ekonomi dari hasil limbahnya seperti kardus, besi dan plastik yang bisa dijual dan didaur ulang kembali," jelasnya. ● pra

Tekan Inflasi, Pemkab Tangerang Siapkan Kunci 4K

TANGERANG (IM) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang menyiapkan kunci 4K untuk menekan angka inflasi pada tahun 2023 mendatang. Kunci 4K yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.

Penerapan Kunci 4K tersebut merespon kondisi eksisting pada saat ini khususnya mengenai kerawanan pangan dan ancaman krisis global. Hal tersebut disampaikan pada rapat koordinasi Tim Pengendali Inflasi Daerah (TIPID) di Hotel Lemo.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Setda Kabupaten Tangerang, H. Yani Sutisna menyampaikan, rapat ini dilakukan untuk melakukan penyusunan program kerja di tahun 2023. Selain itu, untuk mengendalikan angka inflasi menjelang hari Natal dan tahun baru 2023.

"Di tahun 2023 nanti kami akan menerapkan kunci 4K dalam menekan angka inflasi, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, komunikasi efektif serta merespon kondisi eksisting pada saat ini khu-

susnya mengenai kerawanan pangan dan krisis global," katanya, Jumat (9/12).

Dia mengatakan, terdapat sembilan langkah yang menjadi atensi sesuai arahan Mendagri dalam pengendalian inflasi daerah. Kesembilan langkah tersebut, yakni melakukan pemantauan harga dan stok untuk memastikan kebutuhan tersedia, melaksanakan rapat teknis TIPID, menjaga pasokan bahan pokok dan barang penting, melaksanakan gerakan menanam, melaksanakan operasi pasar murah bersama dinas terkait.

Selanjutnya, melaksanakan sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang, kemudian berkoordinasi dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan, merencanakan BTT untuk dukungan pengendalian inflasi. Terakhir memberikan bantuan transportasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

"Semoga menjelang Nataru harga bahan pokok dapat stabil dan tidak mengalami kenaikan. Kita juga akan lakukan pemantauan di segala sektor terutama bidang pangan," pungkasnya. ● pp



KAPAL PESIAR MV VIKING MARS KUNJUNGI DI SURABAYA

Kapal tunda (tug boat) memandu kapal pesiar MV Viking Mars saat akan bersandar di Dermaga Jamrud Utara, Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur, Jumat (9/12). Kapal pesiar tersebut membawa ratusan wisatawan mancanegara untuk berkunjung ke sejumlah tempat wisata di Surabaya dan sekitarnya.